

## Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belu

**Paskalis Kurniawan Suri**  
Universitas Nusa Cendana

**Yohana F. Angi**  
Universitas Nusa Cendana

**Cicilia A. Tungga**  
Universitas Nusa Cendana

Jl. Adisucpto Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: [aissurikm3@gmail.com](mailto:aissurikm3@gmail.com)

**Abstract:** *This study aims to determine and explain the effect of regional financial supervision on the effectiveness of budget management of the Belu Regency Regional Government. The type of research used by researchers is quantitative research using primary data. This research was conducted at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Belu Regency. The sampling technique used in this study was by distributing questionnaires. The data analysis techniques used in this study are data validity and reliability tests, simple linear regression analysis, classical assumptions, hypothesis testing and the coefficient of determination ( $R^2$ ) using the Statistical Package for Social Science 22.0 for windows (SPSS 22) analysis tool. The results of this study indicate that regional financial supervision affects the effectiveness of budget management at the Regional Finance and Asset Agency of the Belu Regency Government.*

**Keywords:** *Financial Supervision, Budget Management Effectiveness, Regional Financial and Asset Management Agency*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap efektivitas pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belu. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Belu. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas dan reliabilitas data, analisis regresi linier sederhana, asumsi klasik, uji hipotesis dan koefisien determinasi ( $R^2$ ) dengan menggunakan alat analisis Statistical Package for Social Science 22.0 for windows (SPSS 22). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Belu.

**Kata kunci:** Pengawasan Keuangan, Efektivitas Pengelolaan Anggaran, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

### PENDAHULUAN

Reformasi pengelolaan keuangan daerah di era otonomi daerah ditandai dengan lahirnya paket kebijakan keuangan negara yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Nuansa pembaharuan dari tiga kebijakan tersebut melandasi bangunan kebijakan dalam tataran teknis yakni Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, Otonomi Daerah

Received Maret 03, 2024; Accepted April 04, 2024; Published April 30, 2024

\* Paskalis Kurniawan Suri, [aissurikm3@gmail.com](mailto:aissurikm3@gmail.com)

merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila hal ini terjadi maka hasilnya akan sama yaitu memperkaya sekelompok orang. Untuk menghindari hal ini daerah harus melakukan pengelolaan keuangannya dengan efektif.

Kelengkapan keuangan daerah ditunjukkan oleh ketercakupan semua kegiatan dan pembangunan daerah dalam satu tahun anggaran. Pengelolaan keuangan daerah harus bersifat efektifitas yang berarti tercapainya tujuan yang direncanakan suatu rencana dapat dilaksanakan secara efektif namun belum tentu efisien karenanya efektifitas tidak menjamin efisiensi dan sebaliknya, untuk itu kedua faktor ini harus dipertimbangkan dalam melaksanakan rencana. Pemerintah daerah merupakan pihak eksekutif yang diberi kepercayaan untuk mengelola keuangan daerah sehingga dalam pengelolaan keuangannya harus transparan yaitu mudah dipahami oleh masyarakat, dapat diterima oleh masyarakat sebagai pelaksana atau pengelola dan harus diaudit maka diperlukan suatu pengawasan yang dilakukan baik pengawasan yang bersifat eksternal maupun internal. Pengawasan yang bersifat eksternal dilakukan oleh badan atau orang yang berasal dari unit organisasi lain selain unit organisasi yang diperiksa sedangkan pengawasan yang bersifat internal dilakukan oleh badan atau orang yang ada di lingkungan unit organisasi yang diperiksa (Wati, 2010:3).

Pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula. Kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada, bila ternyata ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan segera diambil tindakan koreksi. Kegiatan pengawasan tersebut telah diatur berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 (tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) Pasal 1 Ayat (6) menyebutkan bahwa Pengawasan Pemerintah Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah juga terdiri atas pengawasan fungsional, pengawasan legislatif dan pengawasan masyarakat.

Ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 (tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah) Pasal 40 menyebutkan tentang Pengawasan Satuan Internal. Dalam penjelasan pasal ini dinyatakan bahwa pengawasan yang dimaksud dalam ayat ini adalah bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan APBD. Diharapkan dengan adanya pengawasan dapat mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan,

penyelewengan, hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian efektifitas dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi, termasuk biokrasi pemerintahan. Pengawasan sebenarnya terdiri dari usaha mengamati segala sesuatu yang terjadi apakah sudah berjalan sesuai rencana, petunjuk dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan atau kekurangan yang dialami dan membetulkannya serta mencegah agar tidak terulang lagi (Manulang, 2005:173).

Tahun 2022, Kabupaten Belu telah memperoleh penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk penyajian dan pelaporan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pada Kabupaten Belu telah cukup baik, karena terdapat beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian BKAD Kabupaten Belu, diantaranya terkait Pengelolaan Kas pada pemerintah Kabupaten Belu belum sepenuhnya efisien dan pengelolaan aset tetap pada pemerintah daerah tidak efektif. Badan Pemeriksa Keuangan mengharapkan pemerintah Kabupaten Belu dapat meningkatkan pengelolaan keuangannya di masa mendatang dan senantiasa menggunakan sebesar-besarnya keuangan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Terkait dengan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu menjadikannya sebagai salah satu tolak ukur yang utama agar tata pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik yaitu transparansi, akuratif dan partisipatif.

APBD tahun anggaran 2022 terdiri atas pendapatan dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan tahun 2022 sebesar Rp917.050.296, sedangkan penerimaan pembiayaan daerah pada tahun 2022 dianggarkan sebesar Rp45.732.300. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belu”.

## **METODE**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi kasus dan menggunakan data kuantitatif 2017-2022. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini laporan realisasi APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Belu. Data kualitatif dalam penelitian ini berupa informasi terkait pengaruh realisasi belanja daerah berupa analisis pengawasan keuangan daerah terhadap efektivitas pengeelolaan anggaran.

Teknik analisis data menggunakan Uji Validitas dan Reliabilitas Data, Analisis Regresi Linier Sederhana, Uji Asumsi Klasik, Uji Hipotesis, Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### 1. Uji Kualitas Data

Dalam penelitian ini, sebelum menyebarkan kuesioner kepada responden telah dilakukan terlebih dahulu uji kualitas data menggunakan 10 sampel sebagai contoh dan hasil yang diperoleh menyatakan bahwa kuesioner yang digunakan sebanyak 1 item pernyataan tidak valid namun reliabel. Berdasarkan uji coba tersebut, peneliti mengubah kalimat pernyataan dan kembali menguji kuesioner dengan 10 sampel, hasil tersebut menunjukkan bahwa kuesioner yang digunakan valid dan reliabel.

#### a) Hasil Pengujian Validitas

Berdasarkan hasil perhitungan dari masing-masing variabel memiliki koefisien korelasi lebih besar dari nilai  $r_{tabel}$  sebesar 0,320 sehingga dapat dikatakan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini valid.

#### b) Hasil Pengujian Reliabilitas

uji reliabilitas dilakukan terhadap item pertanyaan yang dinyatakan valid. Suatu variabel dikatakan reliabel atau handal jika jawaban terhadap pertanyaan selalu konsisten. Jadi, hasil koefisien reliabilitas variabel pengawasan keuangan daerah adalah sebesar  $r_{alpha} = 0,775$ , variabel efektivitas pengelolaan anggaran adalah sebesar  $r_{alpha} = 0,798$ , ternyata memiliki nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,600. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel penelitian dinyatakan reliabel atau memenuhi persyaratan.

### 2. Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif hasil uji dari masing-masing variabel dependen dan independen meliputi nilai minimum, nilai maksimum, mean dan standar deviasi pada setiap variabelnya. Statistik deskriptif dalam penelitian ini menggunakan satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak, serta satu variabel independen yakni pengawasan keuangan daerah.

### 3. Analisis Regresi Linear Sederhana

Berdasarkan hasil uji analisis regresi linear berganda diperoleh hasil perhitungan persamaan regresi linear berganda yaitu  $y = 5253 + 0,408$  Persamaan regresi tersebut memperlihatkan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial, dari persamaan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa: Nilai constanta adalah

5.253, artinya variabel pengawasan keuangan daerah bernilai nol (0) maka efektivitas pengelolaan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Belu adalah sebesar 5.253 dan Nilai koefisien pengawasan keuangan daerah adalah 0,408, artinya jika variabel pengawasan keuangan daerah (X) meningkat 1 satuan, maka efektivitas pengelolaan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Belu sebesar 0,408.

#### 4. Uji Asumsi Klasik

##### a) Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan Asymp.Sig (2-tailed) dari penelitian ini sebesar 0,66. Nilai Asymp.Sig (2-tailed) mempunyai nilai yang lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditentukan dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,05. Maka, dapat dikatakan bahwa data ini memiliki distribusi normal.

##### b) Hasil Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Hal ini dikarenakan keempat variabel nilai tolerancinya lebih besar dari 0,01 dan nilai VIF bernilai lebih kecil dari 10.

##### c) Hasil Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. Hal ini dikarenakan penyebaran data pola Scatterplot tersebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola khusus.

#### 5. Uji Hipotesis

##### a) Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil pengujian nilai T hitung ( $5,651$ ) > T tabel ( $1,685$ ) dan signifikansi ( $0,000$ ) < alpha ( $\alpha=0,05$ ), maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini berarti variabel pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Belu.

##### b) Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan hasil pengujian nilai koefisien determinasinya sebesar 0,469. Hal ini menunjukkan variabel pengawasan keuangan daerah mempunyai kontribusi sebesar 46,9% terhadap efektivitas pengelolaan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Belu.

## PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap efektivitas pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Belu. Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana yang telah dilakukan untuk

menghitung besarnya pengaruh variabel independen yaitu pengawasan keuangan daerah (X) terhadap efektivitas pengelolaan anggaran (Y), maka diperoleh hasil perhitungan menggunakan aplikasi SPSS 29, yang mana berdasarkan hasil perhitungan, dapat dilihat bahwa terdapat pengaruh positif antara pengawasan keuangan daerah (X) terhadap efektivitas pengelolaan anggaran (Y). Koefisien regresi linier sederhana antara pengawasan keuangan daerah dan efektivitas pengelolaan anggaran adalah 0,408. Artinya, setiap unit peningkatan dalam variabel pengawasan keuangan daerah akan menyebabkan peningkatan sebesar 0,408 dalam efektivitas pengelolaan anggaran. Ini menunjukkan bahwa semakin kuat pengawasan keuangan daerah, semakin tinggi efektivitas pengelolaan anggaran di Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Belu.

Berdasarkan pengujian hipotesis yang dibuktikan dengan pengujian uji t menjelaskan bahwa Penelitian ini membuktikan variabel pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Belu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan penggunaan anggaran yang selama ini dilaksanakan mampu mengukur atau membanding penggunaan keuangan sebelumnya, artinya pengawasan selama ini dilakukan memberikan manfaat untuk menggunakan anggaran sesuai dengan ketentuan yang ditentukan dan lebih baik lagi penggunaan dana lebih efektif dan efisien.

Efektifitas pengawasan pengelolaan APBD yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Belu sudah terbilang optimal, dengan beberapa catatan yang harus dibenahi untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan pengelolaan anggaran 2018-2022 yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten Belu. Efektifitas yang kurang optimal menjadi kendala seperti sarana dan pra-sarana, anggaran atau komitmen kepala daerah. Tingkat efektifitas dari pengawasan pengelolaan APBD kabupaten Belu masih memiliki beberapa catatan penting dalam pelaksanaannya.

Pelaksanaannya masih terkendala oleh anggaran yang minim untuk melakukan pengawasan dan masih kurangnya sarana dan pra-sarana. Guna meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah di kabupaten Belu dengan melihat beberapa permasalahan yang ada, disarankan untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan kepada pegawai inspektorat daerah, meningkatkan kemampuan dalam bidang software pendukung serta melakukan pemaksimalan dalam sarana dan prasarana yang masih kurang.

Pengawasan keuangan yang telah dilakukan mampu membandingkan antara standar penggunaan keuangan dengan kenyataan ada, tidak banyak penyimpangan yang melanggar peraturan tentang pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk

meningkatkan kinerja keuangan yang akan datang perlu diperhatikan perencanaan keuangan yang baik, karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan. Dengan demikian bahwa semakin baik pengawasan yang dilakukan maka semakin baik pula efektivitas penggunaan anggaran pada BPKAD kabupaten Belu.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengawasan daerah terhadap efektivitas pengelolaan anggaran pemerintah daerah kabupaten Belu. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu sebanyak 38 orang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Belu.

## **SARAN**

### 1. Bagi Objek Penelitian

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Belu sebagai objek penelitian dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengawasan pengelolaan yang efektif, sangat menentukan implementasi pendekatan value for money dan pengawasan atas kinerja output menunjukkan bahwa anggaran yang kinerja kualitasnya juga ditentukan juga oleh adanya evaluasi terhadap penggunaan keuangan.

### 2. Bagi Penelitian Selanjutnya

Diharapkan penelitian selanjutnya melakukan penelitian dengan variabel yang lebih banyak untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran, misalnya penetapan standar berupa ukuran kuantitas, kualitas, biaya dan waktu.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Anthony, Robert N.; Vijay Govindarajan. (2004). Edisi 11. Management Control System, New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.

Anthony, Robert et al. 1992. Sistem Pengendalian Manajemen, Edisi Keenam. Diterjemahkan oleh Agus Maulana dalam Management Control System. Penerbit Binarupa Aksara: Jakarta.

Hansen, Don R., Maryanne M. Mowen. 2003. Edisi Keempat. Cost Management Accounting and Control. South Weste Kenis, I. 1979. Effects of Budgetary Goal Characteristics on Managerial Attitudes and Performance. The Accounting Review Vol. LIV No. 4. pp 707.

Halim A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

- Halim A. dan Iqbal M. (2012). Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Ketiga. Jogjakarta: Penerbit UPP AMP YKPN.
- Lewin, K. 1990. Research and Action Minority Problems. The Action Research Reader. Geelong, Victoria: Deakin University.
- Lowe, J., Nicholas and N. A. Shaath. (1990). Sunscreens. Marcel Dekker Inc., New York
- Manullang (2005). Dasar-dasar Manajemen, Yogyakarta: UGM University Press.
- Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Penerbit Andi Yogyakarta.
- Siagian, Sondang P. 1990. Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta: Gunung Agung.
- Siswanto, H. B (2009), Pengantar Manajemen, Bumi Aksara, Jakarta. Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: ALFABETA.
- Sukarna. (2011). Dasar-dasar Manajemen. Bandung: Mandar Maju. Sumarsono, Sonny.2010. Manajemen Keuangan Pemerintahan. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Wati, Elya, Lismawati dan Aprilla N. 2010. Pengaruh Independensi, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi, dan Pemahaman Good Governance Terhadap Kinerja Auditor Pemerintah (Studi Pada Auditor Pemerintah di BPKP Perwakilan Bengkulu). SNA XIII Purwokerto.
- Undang Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Pemerintah Indonesia. 2004. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang perubahan atas Pemerintah Daerah No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah Lembaga Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Legalitas.